

Pendampingan Digitalisasi *Blogspot E-commerce* “ToLinJo” pada Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sumberjo Sanankulon Kabupaten Blitar

¹Dini Putri Ratna Meritasari, ²Devina Safira Prastowo, ³Firdausi Dhulhijjahyani,
⁴Hafidah Putri Pangestu, ⁵Sri Untari

^{1,2,3,4,5}Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Corresponding Author. Email : diniputriratnameritasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 09-08-2024
Revised : 21-08-2024
Accepted : 26-08-2024
Online : 29-08-2024

Keywords:

Pendampingan: PKH;
Digitalisasi; e-commerce

ABSTRACT

Abstract: *The Family Hope Program (PKH) is one of the policies issued by the central government which aims to alleviate poverty. The aim of implementing the service is to improve welfare, increase insight into digitalization and empower PKH beneficiary families in Sumberjo Village. The method used is the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach proposed by Chambers in 1996 which has 5 stages, namely initial socialization, initial planning, mentoring, implementation and evaluation. The results of the service carried out by the service team are increasing economic independence by digitizing e-commerce, increasing insight into the concept of entrepreneurship and improving the quality of human resources through empowerment. It is hoped that this service activity with community empowerment can continue to be carried out in collaboration with policy and the government to solve the problem of poverty in Indonesia.*



Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan wawasan tentang digitalisasi serta pemberdayaan keluarga penerima manfaat PKH Desa Sumberjo. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang dikemukakan oleh Chambers pada tahun 1996 yang memiliki 5 tahapan yaitu sosialisasi awal, perencanaan awal, pendampingan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian adanya peningkatan kemandirian ekonomi dengan digitalisasi *e-commerce*, peningkatan wawasan tentang konsep kewirausahaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan. Harapannya kegiatan pengabdian dengan pemberdayaan masyarakat ini dapat terus dilakukan dengan berkolaborasi dengan kebijakan dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.



<https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Seseorang dapat dikatakan miskin ketika mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sudah sepatutnya masyarakat yang menyandang status sebagai masyarakat miskin mendapatkan perhatian lebih

dari negara. Dari pernyataan tersebut maka negara harus memberikan kebijakan – kebijakan yang disesuaikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, hal ini tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada dasarnya masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh setiap negara dengan berbagai solusi yang ditawarkan dan disesuaikan dengan karakteristik di setiap negara itu. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2023). Jika melihat dari ranking dunia Indonesia masuk dalam 10 negara termiskin di dunia. Faktor yang menjadi penyebab yaitu kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia.

Data lapangan angka kemiskinan di Indonesia yang tiap tahunnya turun berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang pengukuran dapat dilihat dari data kemiskinan berdasarkan konsep kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengukuran tersebut merupakan salah satu pendekatan yang dipandangan sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan tidak diukur dari pengeluaran, hal ini juga dapat diimplementasikan pada jaminan kelangsungan hidup masyarakat (Hasna, N. M., et al, 2020). Dorongan – dorongan dari pemberdayaan sumber daya manusia pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus semakin dikuatkan. Tujuannya dari dorongan pemberdayaan sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K), mengeluarkan beberapa program tentang penanganan kemiskinan antara lain bantuan dan perlindungan sosial berbasis rumah tangga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hasil luaran yang diinginkan yaitu dapat membantu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJM Desa Sumberjo menyatakan bahwa masyarakat penerima manfaat PKH mendominasi golongan pada masyarakat sejahtera I, artinya keluarga tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan dan juga papan. Pelaksanaan PKH di Desa Sumberjo menjadi salah satu sorotan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dikarenakan beberapa prinsip Pancasila terutama gotong royong yang diimplementasikan dalam kehidupan. Keluarga penerima bantuan PKH Desa Sumberjo pada awal pelaksanaan PKH tahun 2007 sudah menerapkan kewirausahaan berupa toko sembako yang dibangun dari sisa dana bantuan dalam bentuk arisan kelompok. Namun, kewirausahaan tersebut bersifat tradisional yang menjadi permasalahan bagi keluarga penerima manfaat PKH di Desa Sumberjo, selain itu toko sembako tersebut kurang diketahui oleh

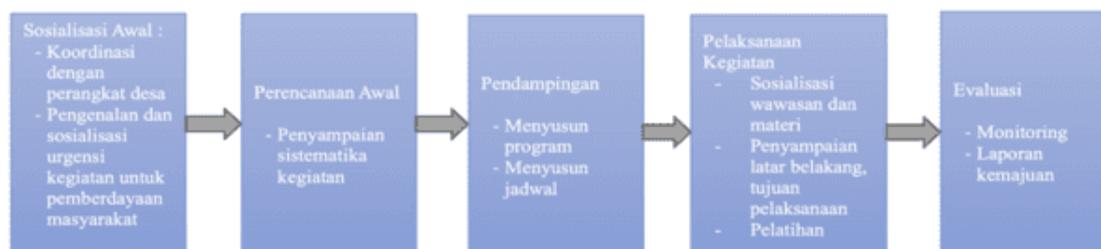
masyarakat khususnya di wilayah Desa Sumberjo sendiri. Sehingga penghasilan toko sembako yang didirikan oleh keluarga penerima manfaat masih jauh dari kata cukup sebagai upaya peningkatan kesejahteraan jika dibandingkan dengan toko – toko lain yang ada di Sumberjo. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pendapatan yaitu kurang strategisnya toko sembako yang didirikan serta manajemen yang kurang baik.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pelatihan dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat mengenai digitalisasi kewirausahaan yang telah didirikan oleh kelompok keluarga penerima manfaat. Tujuan dari pemberdayaan serta pelatihan yaitu untuk memperkenalkan sistem *e-commerce* yang nantinya akan mempermudah dalam penjualan dan transaksi yang lain pada toko sembako yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat PKH di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Harapannya dari pelaksanaan pemberdayaan digitalisasi *e-commerce* ini akan memberikan wadah dan wawasan kepada keluarga penerima bantuan PKH untuk mempermudah sistem kewirausahaan yang dimilikinya. Selain itu, pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi tentang konsep – konsep kewirausahaan secara *offline* dengan membuka toko sembako serta secara *online* dengan berdasarkan pada konsep digitalisasi *e-commerce*.

Beberapa pengabdian dan penelitian yang menjadi dasar referensi dari penulisan artikel ini berdasarkan jurnal pengabdian dengan judul “PKH Shop sebagai Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis” hasil dari pengabdian yang dilakukan yaitu adanya peningkatan wawasan tentang perdagangan dan UMKM yang didirikan oleh penerima bantuan PKH dan penerima mampu untuk mempromosikan perdagangannya dengan sistem jual beli *online* (Azhari, S. C., & Rosali, E. S., 2022). Kemudian jurnal pengabdian dengan judul “Penerapan Teknologi Pengolahan Dodol Sirsak Pada Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh” hasil pengabdian yang dilakukan yaitu adanya kemandirian penerima bantuan PKH dalam proses pengimplementasian teknologi yang bernilai jual (Ermiati, E., et al., 2021). Dengan demikian pelaksanaan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Negeri Malang akan menghasilkan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penerima bantuan dengan penggunaan teknologi digital *e-commerce*. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan wawasan tentang digitalisasi serta pemberdayaan keluarga penerima manfaat PKH Desa Sumberjo.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini bersifat partisipatif. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Sasaran pengabdian yaitu keluarga penerima manfaat PKH aktif. Pendekatan yang diterapkan pada pengabdian ini adalah metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang dikemukakan oleh Chambers pada tahun 1996. Metode ini dikenal karena memiliki teknik yang operasional dan praktis dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat pedesaan secara partisipatif. Pendekatan PRA berfokus pada melibatkan langsung masyarakat dalam proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi, masalah, dan kebutuhan di lingkungan mereka (Hamid, H., 2018). Selain itu, pengabdian ini juga mencakup konsep untuk melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagai sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendekatan PRA ini terdapat 5 (lima) langkah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini (Noor, M., 2011).

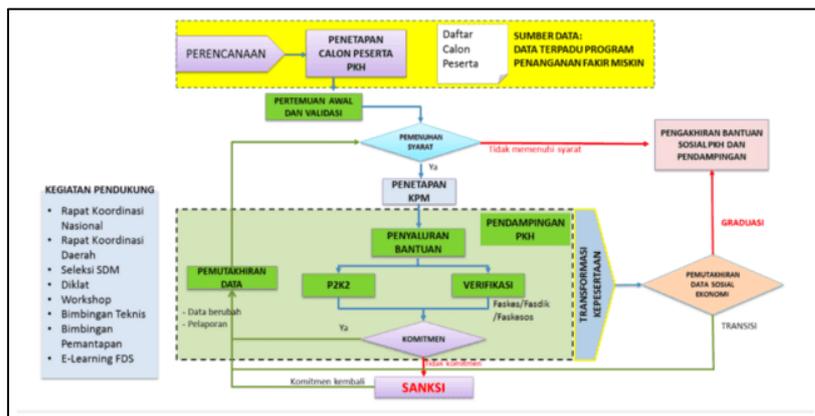


Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan PKH Desa Sumberjo

PKH adalah suatu program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tergolong miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bantuan pada PKH ini bersifat khusus diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Selain itu, bantuan PKH juga bersifat sementara dan bersyarat. Artinya, ketika KPM sudah naik tingkatan kesejahteraaannya maka secara langsung bantuan ini akan berhenti di salurkan. Kemudian, arti dari bantuan bersyarat yaitu KPM harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan seperti ibu hamil, anak sekolah (maksimal 2 anak dalam 1 KPM) dan lansia. Pelaksanaan PKH ini memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan dasar yaitu berupa pendidikan, kesehatan, pangan, gizi serta pendampingan (Susetyo, S., 2021). Adapun mekanisme pelaksanaan PKH berdasarkan panduan Kementerian Sosial seperti pada gambar dibawah ini (Panduan PKH, 2021).



Gambar 2. Alur Pelaksanaan PKH Desa Sumberjo

Berdasarkan pada panduan pelaksanaan PKH, Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar merupakan salah satu desa dengan penerima manfaat bantuan sebanyak 362 keluarga. Data tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH tergolong cukup besar. Penerima manfaat PKH di Desa Sumberjo terdiri dari beberapa golongan berdasarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Penerima PKH Desa Sumberjo

Jumlah	Golongan
167	Anak Sekolah <ul style="list-style-type: none"> - SD sebanyak 72 KPM - SMP sebanyak 57 KPM - SMA sebanyak 38 KPM
33	Ibu Hamil
44	Lanjut Usia
24	Disabilitas Berat
94	Anak Usia Dini

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka keluarga penerima manfaat PKH dan tergolong pada keluarga sejahtera I yaitu kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 2 konsep indikator yaitu Pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) (Makianggung, 2016). Berdasarkan pada 2 konsep indikator tersebut terdapat 3 (tiga) pokok pada proses pemberdayaan masyarakat pertama, sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang intelektual, kedua sebagai akses untuk pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ketiga pemberdayaan dijadikan sebagai sebuah organisasi yang akan menjadi faktor pendukung dalam proses pengembangan diri (Permana, A. C., et al., 2018).

Pelaksanaan PKH di Desa Sumberjo dalam hal pemberdayaan masih tergolong rendah terutama dalam hal digitalisasi era saat ini. Sehingga pelaksanaan PKH dianggap kurang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin. Efektifitas diartikan sebagai unsur yang krusial dalam mencapai suatu tujuan tertentu terutama pada suatu pelaksanaan kebijakan (Jannah, R., & Safarida, N., 2024) Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan digolongkan menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal ditinjau dari perspektif tingkat keefektifan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut (Ginting, R., et al., 2022).

a. Faktor Internal

Pengelolaan kewirausahaan masih bersifat tradisional dikelola oleh KPM PKH. Toko sembako yang didirikan oleh kelompok KPM PKH proses transaksi jual beli dilakukan dengan keharusan mendatangi toko untuk membeli atau menjual sembako. Dengan demikian sulitnya proses pengenalan atau penyebarluasan kepada masyarakat secara umum karena yang membeli sembako adalah KPM dan masyarakat sekitar saja.

b. Faktor Eksternal

Lokasi toko sembako yang didirikan oleh KPM PKH Desa Sumberjo jauh dari kata strategis. Lokasi berada di gang kecil sebelah masjid An – Nur Desa Sumberjo yang menyebabkan kurang diketahui dan masyarakat banyak yang memilih untuk membeli di toko – toko di sebelah jalan raya. Adapun gambar toko sembako yang didirikan oleh KPM PKH Desa Sumberjo sebagai berikut.



Gambar 3. Toko Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Sumberjo

2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Dari faktor yang mempengaruhi berdasarkan observasi lapangan pemberdayaan pada pelaksana PKH sudah seyogyanya menjadi kebutuhan mendasar bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan SDM untuk menjadikan kemandirian perekonomian bagi KPM. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus dikencangkan untuk mencapai tujuan utama sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menikmati kemakmuran serta kesejahteraan (Sudarwati, N., 2009). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian berdasarkan metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Sosialisasi Awal

Sosialisasi awal merupakan langkah awal yang dilakukan dengan memperkenalkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan oleh tim kepada Desa Sumberjo. Sosialisasi awal merupakan salah satu proses pelaksanaan pengabdian yang berhubungan dengan waktu yang akan

datang, perumusan kegiatan yang hendak diusulkan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ghozali, B., & Saifuddin, M., 2022). Luaran yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu perizinan mitra dari Desa Sumberjo. Selain itu sosialisasi awal juga dilakukan untuk kegiatan observasi dan koordinasi yang merupakan langkah awal pengabdian mahasiswa ini. Observasi dilakukan dengan melakukan analisis situasi dan kebutuhan lapangan. Sedangkan koordinasi dilakukan bersama dengan perangkat daerah setempat serta pendamping atau koordinator pelaksana PKH Desa Sumberjo. Luaran yang didapatkan dari kegiatan observasi dan koordinasi yaitu kebutuhan tentang pelaksanaan lapangan bahwa kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun desa tentang digitalisasi kepada KPM PKH. Kegiatan ini disampaikan oleh Bapak Herwanto selaku sekretaris Desa Sumberjo yang menyatakan kesiapannya pengabdian dilakukan di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.



Gambar 4. Sosialisasi Awal

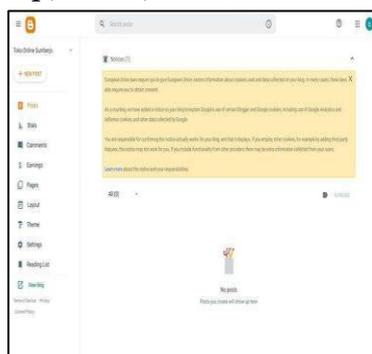
b. Perencanaan Awal

Proses perencanaan awal merupakan salah satu tahapan yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, melihat situasi lapangan serta untuk mengetahui kebutuhan lapangan. Perencanaan juga berkaitan dengan observasi terkait dengan program yang sudah berjalan untuk menyesuaikan dengan tujuan yang telah dirancang oleh tim pengabdian (Handoko, T. Hani., 2003). Perencanaan awal pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di Desa Sumberjo yaitu diawali dengan data penerima manfaat PKH yang nantinya akan diundang untuk pelaksanaan pendampingan *e-commerce blogspot* yang bertempat di balai Desa Sumberjo. Perencanaan awal ini juga akan menentukan beberapa syarat dari KPM PKH yang mampu untuk menggunakan alat komunikasi (*handphone*) berbasis android atau dapat terkoneksi dengan internet yang kemudian dibuatkan undangan oleh sekretaris Desa Sumberjo. Selain itu, dalam pelaksanaan perencanaan awal ini juga menentukan nama blogspot yang cocok untuk *e-commerce* Desa Sumberjo yang pada akhirnya disepakati dengan nama "ToLinJo" atau Toko Online Desa Sumberjo dan nantinya akan menjadi ikon pada *e-commerce*.

The image shows three sheets of handwritten data tables. The first sheet is titled 'DAFTAR BUKU PENERIMAAN KELUARGA' and lists household details. The second sheet is titled 'DAFTAR DATA' and lists recipient information. The third sheet is titled 'KEL. DINI CANDIA DESA NGADIPURNO' and lists names and addresses of recipients.

Gambar 5. Data Penerima Bantuan PKH Desa Sumberjo

Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dilanjutkan dengan proses pembuatan *e-commerce blogspot*. Pemanfaatan pembuatan *e-commerce* dengan menggunakan blogspot merupakan salah satu keunggulan dan nilai positif karena *blogspot* berada dalam satu aplikasi *google* yang tidak memberatkan pada kapasitas penyimpanan *handphone* yang dimiliki (Ramadhani, F., 2021). Selain itu, nilai positif yang didapatkan dengan adanya *e-commerce* dalam peningkatan kewirausahaan yaitu proses transformasi transaksi jual beli yang semakin mudah. Hal ini dibuktikan pada saat merebaknya kasus COVID – 19 yang menjadikan seluruh masyarakat bertransaksi dengan mudah dengan menggunakan aplikasi atau link (Harahap, D. A., 2020).



Gambar 6. Pembuatan Blogspot E-Commerce "ToLinJo"

c. Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama dengan pendamping atau coordinator KPM PKH Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yaitu Ibu Rurin Yuswandari, S.Pd. Pendamping atau coordinator PKH memiliki peran yang penting selama proses pelaksanaan PKH karena dengan adanya pendamping kendala, permasalahan dan hal yang harus dilakukan oleh penerima bantuan akan dengan mudah tersalurkan dan tertangani (Utami, I. P., et al., 2021). Pada pelaksanaan pendampingan diawali dengan proses penentuan tanggal kegiatan pelaksanaan pengabdian. Kemudian dilanjutkan dengan proses koordinasi tentang buku panduan dan modul *e-*

commerce PKH Desa Sumberjo yang nantinya akan menjadi arsip pelaksana PKH, arsip Desa Sumberjo tentang pelaksanaan PKH dan proses – proses pembuatan serta kelola dari *e-commerce* “ToLinJo”. Pendampingan ini dilakukan di kantor Desa Sumberjo. Pokok – pokok pendampingan yang dilakukan berkaitan dengan substansi modul yang dibutuhkan sebagai bahan referensi dan bacaan syarat pengajuan maupun alur dari pelaksanaan PKH berdasarkan buku panduan PKH dari Kementerian Sosial yang terbaru.



Gambar 7. Proses Pendampingan dan Pembuatan Modul dan Buku Panduan

d. Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan merupakan tahapan paling penting untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Pelaksanaan pengabdian secara langsung menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan (Setyawan, N. A., 2022). Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada hari Selasa, 23 Juli 2024 dihadiri oleh 30 peserta undangan KPM PKH, pendamping atau koordinator KPM PKH serta kepala Desa Sumberjo. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di balai Desa Sumberjo. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Adapun tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Presensi atau registrasi peserta
2. Pembukaan oleh MC (sdri. Hafidah Putri Pangestu, S.Pd)
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4. Sambutan oleh Bapak Sunari selaku kepala desa
5. Sambutan oleh Ibu Rurin Yuswandari selaku pendamping atau koordinator KPM PKH Desa Sumberjo
6. Penyampaian materi (sdri. Dini Putri Ratna Meritasari, S.Pd)
7. Proses diskusi (tanya jawab, kuiz dan pelatihan digitalisasi)
8. Penutupan



Gambar 8. Proses Pelaksanaan: Pembukaan, Sambutan, Penyampaian Materi, Pendampingan

e. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan metode deskriptif dan refleksi proses pelaksanaan pengabdian dari tahapan awal hingga akhir. Pada evaluasi juga terdapat tahapan monitoring yang bertujuan untuk mengetahui tentang ketercapaian tujuan dari pelaksanaan pengabdian (NIM, M. M., et al., 2019). Kegiatan ini sudah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM tentang digitalisasi. Pada pelaksanaannya sudah banyak dari keluarga penerima manfaat yang sudah memanfaatkan dari proses digitalisasi *e-commerce* yang dibuat.

3. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan

Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan pengabdian berasal dari eksternal yaitu kesiapan alat dan bahan yang digunakan untuk proses pelaksanaan pengabdian dengan menyiapkan *sound system*, *LcD*, *fotocopy* yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu 30 menit lebih lama dari *timeline* yang telah ditetapkan. Selain itu, karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan agenda desa yaitu posyandu balita yang bertempat di balai Desa Sumberjo menjadikan tempat kegiatan kurang kondusif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian mahasiswa yang berkolaborasi dengan pelaksana PKH di Desa Sumberjo merupakan salah satu wujud penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan prinsip dan nilai Pancasila berdasarkan dengan wawasan keilmuan yang didapatkan oleh mahasiswa. Selain itu, pelaksanaan pengabdian dengan mengangkat tema digitalisasi bukan sebuah kebetulan karena tema ini berkaitan dengan kebutuhan kehidupan saat ini terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Harapannya pemberdayaan pada penerima PKH akan terus dilaksanakan dengan sebaik mungkin baik dari kebijakan secara khusus pada Desa Sumberjo maupun dari kebijakan pemerintahan pusat. Penggunaan *e-commerce* dengan berbasis

blogspot merupakan salah satu bentuk analisis resiko terendah yang berkaitan dengan penyimpanan dan juga prospek jangka panjang tentang inovasi teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Negeri Malang yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian, kepada seluruh undangan keluarga penerima manfaat PKH yang telah hadir termasuk pada koordinator atau pendamping serta perangkat Desa Sumberjo yang telah memberikan perizinan pelaksanaan pengabdian.

REFERENSI

- Azhari, S. C., & Rosali, E. S. (2022). PKH Shop sebagai Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira) Vol, 2*(2).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Kemiskinan di Indonesia*
- Ermiami, E., Zebua, E. A., Agustina, A., Syahrul, S., & Evawati, E. (2021). Penerapan teknologi pengolahan dodol sirsak pada kelompok program keluarga harapan (pkh) kelurahan payobasung, kecamatan payakumbuh timur, kota payakumbuh. *LOGISTA-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(1), 115-120.
- Ghozali, B., & Saifuddin, M. (2022). Implementasi program pemberdayaan masyarakat pada keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (studi pada program keluarga harapan kementerian sosial di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1*(10), 2565-2574.
- Ginting, R., Noor, M., Widodo, S., & Istyaningsih, R. (2022). *The Effectiveness of the Family Program (PKH) Management for Poverty Reduction in Karang Tempel Village, East Semarang District, Semarang City, Central Java, Indonesia. Advances in Social Sciences Research Journal, 9*(7).
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca(Anggota IKAPI Sulsel).
- Handoko, T. Hani.(2003). *Manajemen*. Yogyakarta, Penerbit : BPFH Hal. 69
- Harahap, D.A. 2020. COVID-19 dan transformasi saluran pembelian online. Infobrand.
- Morganosky, M.A. and Cude, B.J. (2000). Consumer response to online grocery shopping. *International Journal of Retail and Distribution Management, 28* (1): 17-26.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2020). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7*(2), 108-116.
- Jannah, R., & Safarida, N. (2024). Literasi Digital *Finance* Pada Penerima Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Digital *Financial Literacy Among Recipients Of The Family Hope Program Assistance Funds*.
- Makiangung, V. J. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- NIM, M. M., Sunyata, L., & Arifin, H. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 8*(4).

- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Panduan Pelaksanaan PKH. (2021). <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64-74.
- Ramadhani, F., & Sari, I. P. (2021, November). Pemanfaatan Aplikasi Online dalam Digitalisasi Pasar Tradisional di Medan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 806-811).
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan legalitas UMKM PKH graduasi melalui sistem online single submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2(1), 1-9.
- Sudarwati, Ninik. (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: Intimedia, Hal 25-26
- Susetyo, S., Hartoyo, H., Junaidi, J., & Fuad Abdulgani, F. (2021). Pelatihan *E-Commerce* Perempuan Penerima Manfaat Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kapasitas UMKM.
- Utami, I. P., Rangga, K. K., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2021). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 19-25.